

## Indonesia Education Budget Policy: The Socio Economic Review

Sri Sumiyati dan Santa Manurung

FKIP Universitas Terbuka

Poltekes Jakarta III

\*Corresponding author : [sumi@ut.ac.id](mailto:sumi@ut.ac.id), [santamanurung@yahoo.com](mailto:santamanurung@yahoo.com)

### Abstract

Human Capital approach in education (Cohn, 1970) states that education serves to provide the ability for a person to be able to play a role in life later and can produce something for life. That the discussion of human investments, clearly should not be separated from the function of education. Adam Smith and Alfred Marshall (in Knezvich, 1975) stated his belief that "the most valuable of all capital is that invested in human beings". So that investment in education really spawned an increase in human resources is high, then the budget provided by the State should be sufficient. Indonesian Proposed Budget 2013 yeras to provides education budget of Rp 331.8 trillion, which reached 20 percent of the total state budget. This policy was encouraging because the quality of education that basically requires a very large cost. Despite the changes and development of education will not achieve the perfect and final (Dewey, 1964). Increase in the education budget is highly dependent on the overall economic conditions and the Indonesian government's policy on education. Conversely, a good education is the forerunner of economic development (Delors *et.al* 1996). It can be said that education would be an agent of social change and cultural change that calls for the development of education policy. This paper will discuss how the economy plays a role in the education budget policy in Indonesia to an increase in the quality of education and its impact on socio-cultural and economic changes.

*Keywords:* education budgets, investment in human resources, economic, social and cultural.

### PENDAHULUAN

Krisis multidimensi saat ini masih menjadi salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Selain krisis ekonomi, krisis moral dan spiritual serta disorientasi nilai dan visi kebangsaan masih menjadi masalah yang krusial yang dihadapi bangsa ini. Hal yang paling menyedihkan sebenarnya justru terlihat pada kondisi pendidikan. Merosotnya nilai-nilai moral dan etika adalah salah satu fenomena yang kita temui saat ini.

Berbicara tentang pendidikan tidak akan pernah sampai pada satu kesimpulan akhir, karena konteks pendidikan selalu dinamis, berubah dan tidak konstan mengikuti perubahan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini merupakan satu keniscayaan seperti yang dinyatakan oleh John Dewey<sup>1</sup> "the educational process has no end beyond itself, it is its own end; and that the education process is one of continual organizing, reconstructing and transforming". Banyak faktor yang turut berpengaruh terhadap pendidikan di Indonesia, diantaranya adalah aspek ekonomi, sosial dan budaya. Perubahan dari sisi sosial dan budaya sangat berpengaruh dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Peningkatan dalam sosial budaya akan meningkatkan pendidikan dan sebaliknya. Karena pendidikan yang baik dalam proses pembelajarannya akan menanamkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berisi aturan-aturan sosial, interaksi sesama manusia dan lingkungan sekitar. Berhadapan dengan perubahan masyarakat dan perubahan sosial seperti yang dijelaskan oleh Philip H Phenix "social change can be analyzed in term of the concepts of structure, function and social need. While no exact laws of social behavior have yet been formulated, some insight may be gained into the basis for individual conformity and deviation and for the transformation that take place in culture, institution, norm, roles and ranking as a result of internal stresses, environmental factors, or external pressure"<sup>2</sup>. Tilaar menyatakan bahwa perubahan ayng terjadi di masyarakat disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu kebutuhan akan demokratisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi.<sup>3</sup>

Satu hal yang tidak boleh terlupakan adalah dukungan penyelenggaraan pendidikan secara materi. Karena pendidikan yang berkualitas tidak berbiaya murah. Ekonomi berperan besar dalam menentukan penyediaan berbagai

---

<sup>1</sup> John Dewey, 2007, *Democracy and Education*h. , Echo Library, h. 42

<sup>2</sup> Philip H. Phenix, *Realms of Meaning: A Philosophy of the Curriculum for General education*, New York: McGraw-Hill Book Company, 1964, h. 132

<sup>3</sup> Tilaar, H.A.R., *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Penganta Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2002, h.22

fasilitas terselenggaranya pendidikan<sup>4</sup>. Dari sisi ekonomi yang paling menarik perhatian adalah biaya pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan yang berkualitas memerlukan biaya yang cukup besar. Konsep ini diambil dari konsep ekonomi pendidikan, dimana pendidikan dinyatakan sebagai investasi dalam bidang sumber daya manusia. Tentu saja investasi akan sangat tergantung dari kemampuan negara dan pemerintah mendanainya yang sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemahaman pemerintah terhadap pentingnya pendidikan dalam konteks pembentuk budaya bangsa. Akan tetapi pada kenyataannya struktur pembiayaan pendidikan di Indonesia hanya 1,4 persen dari PDB meskipun dinyatakan hampir 20% dari APBN. Dalam hal ini kita boleh menyatakan bahwa perhatian pemerintah dalam bentuk dukungan ekonomi dan investasi sumber daya manusia masih sangat rendah.

### **PENDIDIKAN SEBAGAI PEMBENTUK BUDAYA BANGSA**

Esensi dari pendidikan kebangsaan yang terpenting adalah proses “*character and national building*”. Bagi Bangsa Indonesia, persoalan pembangunan karakter dan pembangunan Bangsa bukan barang baru. Presiden Soekarno melontarkan permasalahan nationbuilding ini dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1957. Presiden Soekarno melihat *nation building* sebagai fase kedua dalam revolusi Indonesia sesudah fase liberation, yaitu pembebasan dari penjajahan.<sup>5</sup> Tidak ada bangsa yang hadir tanpa nasionalisme. Karena kita tidak akan dapat membangun Bangsa tanpa membangun pendidikan. Namun setelah puluhan sampai saat ini pembangunan karakter dan pembangunan bangsa tidak banyak mendapat perhatian, khususnya dalam kaitannya dengan dunia pendidikan.

Sejatinya Pendidikan Nasional kita pada adalah pendidikan kewarganegaraan agar dilahirkan warga Negara Indonesia yang berkualitas baik dalam disiplin, baik disiplin sosial maupun disiplin nasional, dalam etos kerja, dalam produktifitas kerja, dalam kemampuan intelektual, kemampuan professional/ vokasional, dalam tanggung jawab kemasyarakatan, kebangsaan dan kemanusiaan. <sup>6</sup> Padahal “pemahaman mencerdaskan kehidupan bangsa” pada hakekatnya adalah “melakukan transformasi budaya dari budaya tradisional ke modern dan dari feodal ke demokratis”, suatu kondisi masyarakat Negara bangsa yang maju<sup>7</sup>.

Pada prakteknya upaya pembentukan nilai-nilai di sekolah yang dalam istilah Soedijarto “*sekolah sebagai pusat pembudayaan*” belum terlaksana. Peranan secara formal telah dilakukan, namun pendidikan yang dilaksanakan sampai sekarang belum dapat berfungsi sebagai wahana transformasi budaya, karena proses pendidikan yang berlangsung di lembaga pendidikan sekolah dari SD sampai perguruan tinggi belum merupakan proses pembudayaan berbagai kemampuan, nilai dan sikap warga masyarakat Negara kebangsaan yang merdeka, demokratis dan berkeadilan sosial. Yang terjadi barulah proses pemberian pelajaran untuk dihafal, dan dipahami dalam waktu yang sangat terbatas dan dengan fasilitas dan prasarana pendidikan yang tidak memungkinkan terjadinya proses pembudayaan sebagaimana seharusnya. Pendidikan sebagai proses pembudayaan inilah yang hakikatnya merupakan pembangunan karakter manusia Indonesia sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa.<sup>8</sup>

Untuk itu perlu ditempuh suatu perubahan radikal (revolusioner) dalam diri manusia dan masyarakat Indonesia, dari masyarakat yang ber-Bhinneka Ketunggal Ika-an, dan masyarakat tradisional dan feodal menuju masyarakat yang modern dan demokratis.<sup>9</sup> Tujuan ini hanya akan dapat tercapai melalui pendidikan yang diselenggarakan dengan baik dan terencana secara Nasional.

### **ASPEK EKONOMI SEBAGAI PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Aspek ekonomi memandang pendidikan sebagai pengembangan sumber daya manusia. Dellors menyatakan bahwa *this progress is due above all to the capacity of humanity to control and organize its environment in accordance with its need, in other word, to science and education, the main driving forces of economic progress*<sup>10</sup>.

Agar terselenggara pendidikan yang bermutu dan bertindak sebagai “Pusat Pembudayaan” diperlukan dukungan ekonomi dari sisi pendanaan yang memadai. Philip Kotler menyatakan bahwa “*without sustained and continues economic progress at the individual and societal level, human potential will not be realized. One clearly has to “have enough in order to be more”. Rising per capita incomes, the elimination of absolute poverty, greater education and employment opportunities, and lessening income inequalities therefore constitute the “necessary”, albeit not sufficient, goals for evelopment.*”<sup>11</sup>. Karena dukungan sisi ekonomi terhadap pendidikan secara tidak

<sup>4</sup> Ridwan Idris, Perubahan Sosial Budaya dan ekonomi Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan, Lentera Pendidikan, Vol 14 No.2 Desember 2011

<sup>5</sup> Ir Soekarno, 1965, Satu Tahun Ketentuan. Dibawah Bendera Revolusi, jilid kedua, Panidya Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, h.498.

<sup>6</sup> Soedijarto, 2008, Landasan dan Arah Pendidikan Kita, Jakarta”PT Kompas Media Nusantara,h.319

<sup>7</sup> Soedijarto, 2012, *Pancasila sebagai Falsafah Dasar dan Ideologi Negara Kebangsaan Indonesia dan Maknanya bagi Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional*, disajikan dalam Hari Studi Asosiasi Sekolah Jesuit Indonesia.

<sup>8</sup> Soedijarto op.cit., h.15

<sup>9</sup> *Pancasila Sebagai Filsafat Dasar dan Ideologi Negara Kebangsaan dan Negara Kesejahteraan Republik Indonesia* <http://soedijarto.blogspot.com/search/label/Makalah>

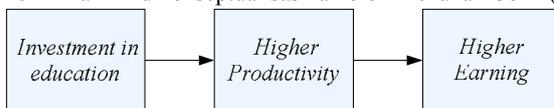
<sup>10</sup> Jacques Delors et.al, Learning: The Treasure Within, The Report to UNESCO of International Commission for The Twenty-First Century, Paris: UNESCO, 1996, h.71

<sup>11</sup> Philip Kotler et.al., 1997, *The Marketing of Nations: A Strategic Approach to Building National Wealth*, New York: The Free Press, h. 23.

langsung juga memberikan dukungan terhadap perkembangan ekonomi. *Confucian society. Confucian society encouraged economic growth through its support of education and achievement.*<sup>12</sup>. Menurut Soedijarto anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN agar sekolah kita bermutu. Bermutu berarti memiliki fasilitas yang memadai, kurikulum dan kelengkapannya, tenaga pendidik yang kompeten, waktu belajar, sistem evaluasi yang baik serta lingkungan sekolah yang kondusif.<sup>13</sup>

Dari segi teori ekonomi pendidikan, khususnya pendekatan human capital, aspek pembiayaan dipandang sebagai bagian dari investasi pendidikan yang menentukan taraf produktivitas individu maupun kelompok. Pendidikan memberikan bekal kepada masyarakat sehingga lebih siap menghadapi perubahan-perubahan dalam kehidupan. Selanjutnya juga berperan dalam peningkatan sumber daya manusia dan akhirnya juga mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi bangsa melalui peningkatan produktivitas. Pada gilirannya taraf produktivitas ini mempengaruhi taraf perolehan (earning) seseorang atau kelompok yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pendidikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan investasi pada sumber daya manusia (human investment). Secara nyata hal ini terlihat dari perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap serta produktivitas.

Pemikiran ini dikonseptualisasikan oleh Elchanan Cohn (1979)<sup>14</sup> dalam suatu model sebagai berikut :



Gambar 1 Pendekatan Human Capital dalam Pendidikan (Cohn, 1970:29)

Jika dicermati, bahwa pendidikan berfungsi untuk memberikan kemampuan pada seseorang agar mampu berperan dalam kehidupannya kelak, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya. Bila berbicara mengenai investasi manusia, jelas tidak boleh lepas dari fungsi pendidikan. Adam Smith dan Alfred Marshall (dalam T.K Meti)<sup>15</sup> mengemukakan keyakinannya bahwa *“the most valuable of all capital is that invested in human beings”*.

Sama halnya dengan sebuah investasi, maka pelaksanaan pendidikan tidak akan terlepas dari biaya-biaya yang diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Mark Blaug (1976) yang menyatakan bahwa : *“.... A good case can now be made for the view that educational expenditure does partake to a surprising degree of the nature of investment in enhanced future output. To that extent, the consequences of education in the sense of skills embodied in people may be viewed as human capital, which is not to say that people themselves are being treated capital. In other word, the maintenance and improvement of skills may be seen as investment in human beings, but the resources devoted to maintaining and increasing the stock of human beings remain consumption by virtue of the abolition of slavery”*.

Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata, akan tetapi merupakan suatu investasi. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Jones (1985) yang menyatakan bahwa *“The people have certain skills, habit, and knowledge, which they sell to employers in the form of their wage salaried labor, and which can be expected to provide them a flow of income over their lifetimes. Furthermore, human capital can be analogized in some respects to physical capital because both are used together to produce a stream of income over some period of years”*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan investasi individu yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi substansial bagi perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang. Penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan pentingnya peranan investasi sumber daya manusia bagi pertumbuhan ekonomi<sup>16</sup>.

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Hal tersebut sesuai dengan pendapat R. Johns, Edgar L. Morphet dan Kern Alexander (1983:45) yang menyatakan bahwa *“Education has both private and social cost, which may be both direct and indirect, direct cost are incurred for tuition, fees, books, room and board. In a public school, the majority of these costs are subsumed by the public treasury and thus become social*

<sup>12</sup> Ronald Inglehart, 1997, *Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, h. 3.

<sup>13</sup> Soedijarto op.cit., h.315

<sup>14</sup> Elchanan Cohn, Sherrie L. W. Rhine and Maria C. Santos, (1989) *Institutions of Higher Education as Multi-Product Firms: Economies of Scale and Scope*, *The Review of Economics and Statistics* Vol. 71, No. 2 (May, 1989), pp. 284-290

<sup>15</sup> T.K Meti, 1989, *Agricultural Growth and Non Agricultural Growth Dynamic of National Development*, Gian Publishing House, h.50

<sup>16</sup> World Development Report, 1980

*costs. Indirect costs of education are embodied in the earnings which are forgone by all persons of working age, but foregone earnings are also a cost to society, a reduction in the total productivity of the nation”.*

Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa. Kebanyakan biaya langsung berasal dari sistem persekolahan sendiri seperti SPP, dan Sumbangan Orang Tua murid untuk pendidikan atau yang dikeluarkan sendiri oleh siswa untuk membeli perlengkapan dalam melaksanakan proses pendidikannya, seperti biaya buku, peralatan dan uang saku. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk kesempatan yang hilang dan dikorbankan oleh siswa selama belajar.<sup>17</sup>

Menurut Cohn<sup>18</sup> biaya pendidikan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Biaya langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan secara langsung untuk membiayai penyelenggaraan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, seperti gaji guru, pegawai non edukatif, buku-buku pelajaran dan bahan perlengkapan lainnya. Hal ini berpengaruh pada hasil pendidikan berupa nilai pengorbanan untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut.
- b. Biaya tak langsung (Indirect cost), yaitu meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan. Bisa juga berupa keuntungan yang hilang (earning forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa *“Direct cost have received by far the bulk of attention, perhaps because the consequences of such costs are directly and strongly felt by the tax payer-and, of course, because statistics on direct school outlays are readily available (or estimable), where as indirect cost must be imputed. The majority of direct cost are incurred by the school systems themselves”.*

#### ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM APBN

Kewajiban konstitusi dengan menetapkan porsi anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBN memperlihatkan sifat pendidikan yang demikian penting bagi perjalanan bangsa ke depan, dengan mempersiapkan kualitas manusia Indonesia yang mampu secara teknis membangun negara dan berkompetisi melalui pengembangan teknologi dengan memperhatikan sisi akhlak mulia. Anggaran pendidikan Departemen Pendidikan Nasional yang kemudian berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara berganti menjadi Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun, alokasi anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 Amandemen IV Tahun 2002 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional baru dapat direalisasikan pada tahun 2009. Hal tersebut menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati disebabkan semata-mata karena terbatasnya anggaran pemerintah.

Sedangkan DPR beranggapan bahwa belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBN menunjukkan lemahnya kemauan politik (*political will*) pemerintah untuk memposisikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama.

Dalam PP Nomor 25 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2004-2009 (RPJMN 2004-2009), Pendidikan kemudian ditetapkan sebagai salah satu prioritas dalam agenda utama pembangunan nasional, yaitu prioritas peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas.

Dalam merencanakan pemanfaatan anggaran 20% (dua puluh persen), pemerintah menguraikan kebijakan pendidikan ke dalam beberapa program yang dipandang menjadi prioritas utama yang harus segera dilakukan. Prioritas penggunaan anggaran sebanyak 20% (dua puluh persen) dari APBN bidang pendidikan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, menuntaskan wajib belajar 9 tahun dengan kualitas yang lebih baik, murah, dan terjangkau, akses mutu dan relevansi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang lebih baik, serta mutu dan relevansi penelitian yang lebih baik. Selain itu juga memperhatikan beasiswa kepada siswa/mahasiswa berprestasi serta mendapatkan jaminan melanjutkan pendidikan dimanapun, memberikan perhatian pada pendidikan non formal yang lebih baik dan penguatan tata kelola. Kerangka dasar dan arah kebijakan tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Depdiknas 2005-2009. Sasaran pelaksanaan program DAK Bidang Pendidikan pada tahun 2009 adalah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) 6 (enam tahun) baik negeri maupun swasta untuk kegiatan rehabilitasi/pembangunan fisik.

Jika kita telaah APBN tahun 2013, pemerintah telah mengalokasikan Rp 331,8 triliun untuk anggaran sektor pendidikan, naik lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun 2007 (Rp142,2 T<sup>19</sup>). Dinyatakan pula bahwa jumlah tersebut selain telah memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, merupakan peningkatan 6,7 persen dibanding anggaran yang dilokasikan tahun 2008 lalu sebesar Rp 310,8 triliun.

<sup>17</sup> Cohn, 1979; Thomas Jone, 1985; Alan Thomas, 1976. dalam Nanang Fattah, 2000, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, Remaja Rosda Karya Bandung, hal. 23.

<sup>18</sup> Cohn, E., 1979, *Economics of Education* (revision edition). Printed in United States of America, hal 62

<sup>19</sup> Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2013

Akan tetapi anggaran sebesar itu lebih banyak diperuntukkan pada pembiayaan konsumtif daripada peningkatan pelayanan pendidikan. Anggaran tersebut digunakan oleh pemerintah dengan rincian:

- Penyediaan BOS pendidikan menengah bagi sekitar 9,6 juta siswa SMA/SMK/MA;
- pembangunan 216 Unit Sekolah Baru (USB) dan 4.550 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SMLB; dan rehabilitasi ruang kelas rusak SMA/SMK/MA;
- Menyediakan bantuan bagi sekitar 14,2 juta siswa dan mahasiswa kurang mampu, dan memberikan beasiswa prestasi bagi 220.000 siswa dan mahasiswa;
- Memulai rehabilitasi sekitar 23.000 ruang kelas rusak berat SMA/SMK/MA dan sekitar 30.350 ruang kelas rusak sedang SD/MI/SMP/MTs.
- Penyediaan dana tunjangan profesi guru: Rp43,1 T, naik Rp12,5 T atau lebih dari 40% dibanding pagu APBN Tahun 2012;
- Pelaksanaan sertifikasi guru bagi lebih dari 325 ribu guru di sekolah/madrasah.
- Pembentukan endowment fund berupa “Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)”, sejak tahun 2010; dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya juga ditujukan untuk pembentukan dana cadangan pendidikan guna mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam
- Secara akumulatif, jumlah DPPN sejak tahun 2010 hingga 2012 (APBNP) mencapai Rp10,6 T, sedangkan dalam RAPBN 2013 direncanakan Rp5 T;

Jika kita amati angka-angka dia atas terlihat cukup besar, namun sebenarnya hanya sedikit dana yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggaran dialokasikan untuk Dana Alokasi Umum (DAU), mayoritas dimanfaatkan untuk gaji guru, Dana Alokasi Khusus (DAK), tunjangan profesi guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan lainnya. Soedijarto menyatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan di Indonesia hanya 1,4 persen dari PDB.<sup>20</sup> merupakan anggaran terendah di Asia. Sedangkan Negara-negara Uni Eropa rata-rata mengalokasikan anggaran 5 persen dari PDB dan Belanda serta Jepang 7 persen dari PDB. Hal ini disebabkan di Negara yang sudah maju Pendidikan dipandang sebagai aspek konsumtif dan investatif (Human Investment) dan menjadi *leading sector*.

Kebijakan pemerintah ini bukannya dibiarkan oleh para pemerhati pendidikan di Indonesia. Tidak dibiayainya pendidikan secara memadai sesuai dengan ketentuan yang tersirat dan tersurat, baik dalam UUD 1945, maupun UU No. 20 Tahun 2003 dalam pasal 49 ayat (1) menetapkan minimal 20 % APBN tidak termasuk gaji guru pada hakekatnya menyimpang dari hakekat Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan. Karena tanpa pendidikan yang bermutu yang dapat menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas secara intelektual, berwatak, beretos kerja tinggi, berdisiplin, dan bermoral, kesejahteraan tidak akan meningkat.

Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi yang memasukan gaji pendidik dalam anggaran pendidikan 20 persen dinilai sangat aneh dan mengabaikan kondisi objektif masyarakat. Putusan tersebut akan merugikan guru dan secara langsung menghambat pemerintah dalam menjalankan kewajiban konstitusi, menyediakan pelayanan pendidikan bermutu dan gratis bagi masyarakat terutama pada tingkat dasar.

Hal tersebut mengemuka dalam sidang pertama eksaminasi atas putusan MK no.24/PUUV/2007 di Wisma PGI (12/3/03). Hadir dalam sidang, tim perumus yang berasal dari Indonesia Corruption Watch dan Koalisi Pendidikan serta lima orang anggota majelis eksaminasi, yaitu Prof. Dr. Winarno Surachmad, Prof. Sudjiarto, Zainal Arifin M.Husein, S.H.,L.L.M, Supriyadi Widodo, dan Yuna Farhan.

Menurut pakar pendidikan Prof. Sudjiarto, latar belakang ditetapkannya ayat (4) pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menggariskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD, bukan asal comot. Tapi merupakan upaya agar pemerintah dapat menjalankan kewajiban konstitusionalnya, seperti membiayai sepenuhnya penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar, mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan tidak dimasukkannya gaji guru dalam anggaran pendidikan, bukan berarti kesejahteraan guru diabaikan. Sebab, dalam UU Sisdiknas 20/2003 maupun UU 14/2005 mengenai guru dan dosen, hal tersebut telah dijamin. Bahkan guru berhak mendapat berbagai penghasilan dan tunjangan, misalnya tunjangan profesi atau masalah tambahan.<sup>21</sup>

Melihat kenyataan seperti itu bagaimana mungkin Indonesia mencapai satu kondisi pembangunan ekonomi yang tinggi dengan ditunjang oleh pembentukan tenaga kerja yang trampil mengelola sumber daya alam. Karena Delors<sup>22</sup> menyatakan bahwa “*Education system can therefore no longer be expected to train labour force for stable industrial jobs; they must instead train individuals to be innovative, capable of evolving, adapting to a rapidly changing world and assimilating change.*”

<sup>20</sup> Soedijarto op.cit, , h.355

<sup>21</sup> <http://www.antikorupsi.org/id/content/putusan-mk-hambat-pencerdasan-bangsa>  
<sup>22</sup> Delors, op.cit, h.71

Dengan hasil pendidikan yang demikian akan membawa perubahan pada pembangunan ekonomi negara. Negara akan mengalami kemajuan pada ketersediaan sumber daya manusia yang dapat menambah nilai pendapatan atau devisa negara. Karena manusia yang dipandang sebagai modal dalam pembangunan adalah manusia yang mempunyai profesionalisme (*skill*) dalam kehidupannya, karena manusia mempunyai harga yang dapat diketahui dari ide-ide (pemikiran) sehingga akan melahirkan kreativitas yang diciptakannya, akibat dari hasil pendidikan yang diperolehnya.

Pendidikan dipandang sebagai pusat pembudayaan bagi bangsa Indonesia, di tengah-tengah kondisi bangsa dalam menghadapi arus globalisasi. Pendidikan juga harus mampu berkembang dengan baik di tengah-tengah masyarakat yang multikultur. Bangsa Indonesia harus mengakui, menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan mendasar dengan orang-orang yang berbeda budaya dengannya. Menjadikan pendidikan yang bersifat multikultural berarti memosisikannya sebagai gerakan sosial budaya yang terkait pada suatu kesatuan komunitas budaya global. Dengan menjadi bangsa yang multikultural, sejatinya bangsa Indonesia telah berupaya mengurangi konflik antar budaya, antar etnis, antar kelompok yang menjadi intisari dari pendidikan kebangsaan.

Disamping itu agar dapat menyelenggarakan pendidikan yang baik dan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan *founding father*, maka alokasi anggaran pendidikan harus cukup besar dan didukung oleh segenap elemen bangsa.

#### KESIMPULAN

Pendidikan dipandang sebagai pusat pembudayaan bagi bangsa Indonesia, di tengah-tengah kondisi bangsa dalam menghadapi arus globalisasi. Pendidikan juga harus mampu berkembang dengan baik di tengah-tengah masyarakat yang multikultur. Bangsa Indonesia harus mengakui, menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan mendasar dengan orang-orang yang berbeda budaya dengannya. Menjadikan pendidikan yang bersifat multikultural berarti memosisikannya sebagai gerakan sosial budaya yang terkait pada suatu kesatuan komunitas budaya global. Dengan menjadi bangsa yang multikultural, sejatinya bangsa Indonesia telah berupaya mengurangi konflik antar budaya, antar etnis, antar kelompok yang menjadi intisari dari pendidikan kebangsaan.

Disamping itu agar dapat menyelenggarakan pendidikan yang baik dan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan *founding father*, maka alokasi anggaran pendidikan harus cukup besar dan didukung oleh segenap elemen bangsa.

#### RUJUKAN

- Cohn, E., (1979), *Economics of Education* (revision edition). Printed in United States of America.
- Elchanan Cohn, Sherrie L. W. Rhine and Maria C. Santos, (1989) *Institutions of Higher Education as Multi-Product Firms: Economies of Scale and Scope*, *The Review of Economics and Statistics* Vol. 71, No. 2 (May, 1989)
- Jacquest Delors et.al, *Learning: The Treasure Within*, The Report to UNESCO of International Commission for The Twenty-First Century, Paris: UNESCO, 1996
- John Dewey, (1964), *Democracy and Education*, New York: The Macmillan Company
- Mohammad Hatta, (1992), *Beberapa pokok pikiran* : Jakarta UI-Press.
- Nanang Fattah, (2000), *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Remaja Rosda Karya Bandung
- Philip H. Phenix, *Realms of Meaning*, (1964), *A Philosophy of the Curriculum for General education*, New York: McGraw-Hill Book Company
- Philip Kotler et.al., 1997, *The Marketing of Nations: A Strategic Approach to Building National Wealth*, New York: The Free Press.
- Philip H. Phenix (1964) *Realms of Meaning: A Philosophy of the Curriculum for General education*, New York: McGraw-Hill Book Company.
- Ridwan Idris, *Perubahan Sosial Budaya dan ekonomi Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan*, *Lentera Pendidikan*, Vol 14 No.2 Desember 2011
- Ronald Inglehart, 1997, *Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Soedijarto, (2008), *Landasan dan Arah Pendidikan Kita*, Jakarta”PT Kompas Media Nusantara
- Soedijarto, (2008), *Landasan dan Arah Pendidikan Kita*, Jakarta”PT Kompas Media Nusantara.
- Soedijarto, (2012), *Pancasila sebagai Falsafah Dasar dan Ideologi Negara Kebangsaan Indonesia dan Maknanya bagi Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional*, disajikan dalam Hari Studi Asosiasi Sekolah Jesuit Indonesia
- Soekarno, (1965), *Satu Tahun Ketentuan. Dibawah Bendera Revolusi*, jilid kedua, Panidya Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi
- Tilaar, H.A.R., (2002), *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo.
- T.K Meti, 1989, *Agricultural Growth and Non Agricultural Growth Dynamic of National Developmen*, Gian Publishing House

Pancasila Sebagai Filsafat Dasar dan Ideologi Negara Kebangsaan dan Negara Kesejahteraan Republik Indonesia

[http://soedijarto.blogspot.com/2013/05/pancasila-sebagai-filsafat-dasar-dan\\_23.html](http://soedijarto.blogspot.com/2013/05/pancasila-sebagai-filsafat-dasar-dan_23.html)

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013

<http://www.antikorupsi.org/id/content/putusan-mk-hambat-pencerdasan-bangsa>

[file.upi.edu/Direktori/FPEB/...EKONOMI.../Handout\\_Ekpend\\_.pdf](file.upi.edu/Direktori/FPEB/...EKONOMI.../Handout_Ekpend_.pdf)

<ejurnal.uin-alauddin.ac.id/.../07%20Perubahan%20Sosial%20Budaya%2>